

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Akuntansi sektor publik di Negara Indonesia semakin pesat perkembangannya karena adanya pelaksanaan kebijakan pemerintah yaitu otonomi daerah dan desentralisasi fiskal yang menitikberatkan pada Pemerintah Daerah. Selain itu, maraknya globalisasi yang menuntut daya saing di setiap negara juga menuntut daya saing di setiap pemerintah daerahnya. Yang perlu dikembangkan di Negara Indonesia adalah mewujudkan suatu iklim ke-pemerintahan yang baik (*good governance*) yang ditandai dengan adanya tiga pilar elemen dasar yaitu transparansi, partisipasi dan akuntabilitas.

Transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas dapat dilihat dari kualitas laporan keuangan yang telah disajikan. Laporan keuangan pemerintah di Indonesia merupakan hal yang menarik untuk dikaji, karena semakin menguatnya tuntutan akuntabilitas di lembaga publik baik di pusat maupun di daerah yang dapat menimbulkan implikasi bagi pemerintahan sektor publik untuk memberikan informasi yang lebih baik lagi. Tujuan penyusunan laporan keuangan sebagaimana dinyatakan dalam Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya.

Dasar pengelolaan laporan keuangan yang baik perlu adanya sistem dan prosedur kelembagaan yang mendukung terciptanya kualitas laporan keuangan (Fransiska dkk, 2016). Laporan keuangan yang berkualitas harus dapat meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan memenuhi empat karakteristik kualitatif laporan keuangan pemerintah yang disyaratkan dalam Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 yakni relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami.

Faktor pertama yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan yaitu Sistem Pengendalian Intern (SPI). Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008, Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada suatu tindakan atau kegiatan yang dilakukan dengan terus menerus oleh pimpinan dan semua pegawai untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara serta ketaatan terhadap peraturan perundang – undangan.

Hasil penelitian terdahulu terkait variabel sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan menunjukkan adanya perbedaan sesuai dengan penelitian yang dilakukan Mutianadkk (2017) dan Wijayanti (2017). Menurut Mutiana dkk (2017) memberikan hasil penelitian bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. sedangkan menurut Wijayanti (2017) memberikan hasil penelitian bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh secara statistik signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

Faktor kedua yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan yaitu teknologi informasi. Dengan menggunakan teknologi informasi seperti komputer

dalam menghitung dan menyusun laporan keuangan maka akan lebih cepat, akurat dan otomatis daripada menggunakan sistem manual. Dalam penjelasan PP Nomor 56 Tahun 2005 pada sistem informasi keuangan disebutkan bahwa dalam menindaklanjuti proses perkembangan sejalan dengan tata kelola yang baik, pemerintah berkewajiban mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan mengelola keuangan daerah serta menyalurkan informasi keuangan daerah kepada pelayanan publik.

Hasil penelitian terdahulu terkait dengan variabel teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan terdapat perbedaan sesuai dengan penelitian Mutiana dkk (2017), Wijayanti (2017) dan Riandani (2017). Menurut Mutiana dkk (2017) dalam hasil penelitiannya menunjukkan bahwa teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Menurut Wijayanti (2017) dalam hasil penelitiannya bahwa teknologi informasi berpengaruh secara statistik signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Sedangkan menurut Riandani (2017) dalam hasil penelitian menunjukkan bahwa teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

Faktor ketiga, permasalahan mendasar dalam penyusunan laporan keuangan adalah SDM. Menurut Delanno (2013) menyatakan bahwa kualitas sumber daya manusia adalah manusia untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan dengan bekal pendidikan, pelatihan dan pengalaman yang memadai. Upaya untuk mengembangkan sumber daya manusia terutama untuk mengembangkan kemampuan intelektual dan kepribadian serta keterampilan

khusus seseorang atau kelompok dapat dilakukan dengan mengikuti pendidikan dan pelatihan.

Hasil penelitian terdahulu terkait dengan sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan menunjukkan adanya perbedaan hasil penelitian sesuai dengan penelitian Mutiana dkk (2017), Wijayanti (2017), dan Riandani (2017). Menurut penelitian Mutiana dkk (2017) dan Riandani (2017) memberikan hasil penelitian bahwa sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. sedangkan dalam penelitian Wijayanti (2017) memberikan hasil penelitian bahwa sumber daya manusia tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

Kemudian faktor keempat yaitu komitmen organisasi. Komitmen organisasi adalah sikap yang menunjukkan loyalitas pekerja pada suatu organisasi dan merupakan proses yang sedang berjalan melalui peserta organisasi menyatakan perhatian mereka terhadap organisasi tersebut serta kelanjutan keberhasilan dan kesejahteraannya (Wibowo 2013: 214). Menurut Carsten dan Spector dalam Adifitya (2014:837) mengatakan bahwa semakin tinggi komitmen organisasi maka karyawan akan tetap tinggal dalam organisasi dan meningkatkan kinerjanya. Komitmen organisasi bisa tumbuh disebabkan karena individu memiliki ikatan yang emosional terhadap organisasi yang meliputi dukungan moral dan menerima nilai-nilai yang ada serta tekad dari dalam diri untuk mengabdikan pada organisasi.

Hasil penelitian terkait dengan variabel komitmen organisasi terhadap kualitas laporan keuangan menunjukkan adanya perbedaan hasil penelitian sesuai dengan penelitian Mutiana, dkk (2017) dan Tamimi (2016). Menurut Mutiana, dkk

(2017) dalam penelitiannya menunjukan bahwa komitmen organisasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Sedangkan dalam penelitian Tamimi (2016) menunjukan bahwa komitmen organisasi tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

Faktor kelima yang dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan yaitu Standar Akuntansi Pemerintah. Menurut PP Nomor 71 Tahun 2010, Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) adalah prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. SAP harus digunakan sebagai acuan dalam menyusun laporan keuangan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi pemerintah (SAP) bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan informasi dan membuat keputusan.

Hasil penelitian terkait dengan variabel standar akuntansi pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan menunjukkan adanya perbedaan penelitian sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Triwardhana (2017), Udiyanti dkk (2014), dan Fikri (2016). Menurut Triwardhana (2017) dan Udiyanti (2014) memberikan kesimpulan bahwa standar akuntansi pemerintah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Sedangkan menurut Fikri (2016) memberikan hasil kesimpulan bahwa standar akuntansi pemerintah berpengaruh tidak signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

Buruknya kualitas suatu laporan keuangan dapat diartikan bahwa kinerja pemerintah tersebut juga buruk, yang kemudian dibuktikan dengan diperolehnya opini *disclaimer* di beberapa instansi pemerintah daerah yang ada di Indonesia

(Udiyanti, *et.al.*, 2014). Laporan keuangan setiap tahunnya mendapat penilaian berupa opini dari Badan Pengawas Keuangan (BPK) yaitu opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Opini Tidak Wajar (TW), dan Tidak Memberi pendapat atau TMP (PP No. 24 Tahun 2005).

Berdasarkan pemeriksaan BPK RI tahun 2016 terhadap LKPD di kota Semarang, BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Tetapi meski mendapatkan opini WTP masih terdapat beberapa permasalahan terkait dengan lemahnya Sistem Pengendalian Intern (SPI) serta kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan. Permasalahan terkait lainnya yaitu permasalahan aset tetap, permasalahan belanja dan permasalahan pendapatan kemudian permasalahan terkait sistem pengendalian intern yaitu peralihan personil, peralatan, pembiayaan (P3D) dari pemkab/kota ke pemprov belum tertib, penatausahaan aset tetap P3D belum memadai. Kemudian piutang pajak kendaraan belum sepenuhnya didukung dengan database yang memadai. Dan penerimaan pajak [kendaraan bermotor](#) tidak menunjukkan potensi yang sebenarnya.

Permasalahan lain yang terjadi dalam menyusun laporan keuangan yaitu kondisi sumber daya manusia yang dimiliki pemerintah saat ini memiliki keahlian dan ditunjang dengan teknologi yang cukup memadai, namun masih tidak memberikan perubahan yang besar dalam peningkatan kinerja. Selain itu, sumber daya yang dimiliki pemerintah sering kali tidak memiliki etos kerja untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Apabila sumber daya manusia tidak memiliki salah satu kualitas yang disyaratkan, maka memungkinkan timbulnya

hambatan dalam pelaksanaan fungsi akuntansi dan informasi akuntansi (Mutiana dkk, 2017).

Berdasarkan beberapa kajian dari penelitian terdahulu dan adanya *research gap*, maka penelitian ini untuk menguji kembali apakah sistem pengendalian intern, teknologi informasi, kualitas sumber daya manusia, komitmen organisasi dan standar akuntansi pemerintah mempunyai pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan di kota Semarang. Penelitian ini adalah pengembangan dari peneliti sebelumnya yang dilakukan oleh Mutiana dkk (2017), adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu pada tempat dilaksanakannya penelitian serta penambahan variabel Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).

1.2. Rumusan Masalah

1. Apakah sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan satuan kerja perangkat daerah?
2. Apakah teknologi informasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan satuan kerja perangkat daerah?
3. Apakah kualitas sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan satuan kerja perangkat daerah?
4. Apakah komitmen organisasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan satuan kerja perangkat daerah?
5. Apakah penerapan standar akuntansi pemerintah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan satuan kerja perangkat daerah?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini, yaitu :

1. Membuktikan sistem pengendalian intern memiliki pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan satuan kerja perangkat daerah.
2. Membuktikan teknologi informasi memiliki pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan satuan kerja perangkat daerah.
3. Membuktikan kualitas sumber daya manusia memiliki pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan satuan kerja perangkat daerah
4. Membuktikan komitmen organisasi memiliki pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah
5. Membuktikan penerapan standar akuntansi pemerintah memiliki pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan satuan kerja perangkat daerah.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

Bermanfaat untuk ilmu ekonomi khususnya akuntansi pada sektor publik tentang pengaruh sistem pengendalian intern, teknologi informasi, kualitas sumber daya manusia, komitmen organisasi dan standar akuntansi pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan satuan kerja perangkat daerah.

1.4.2. Manfaat Praktis

Bagi Pemerintah Daerah, penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi mengenai pengaruh sistem pengendalian intern, teknologi

informasi, kualitas sumber daya manusia, komitmen organisasi dan standar akuntansi pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan satuan kerja perangkat daerah.